

Soal Sampah, Bagaimana Tanggapan DPRD Karawang



(mengangkut sampah) di restoran, mal, dan pasar,” jelasnya.

Namun dinas, kata Natala, melupakan tugas utamanya dalam melayani dan mengambil sampah di TPS (Tempat Pembuangan Sampah) untuk dibawa ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir). Padahal, masyarakat di perkotaan sudah membayar retribusi sampah via potongan di PDAM.

hanya dua hari sekali, ada yang tiga hari sekali. Itu tidak mencukupi,” imbuhnya.

DLHK tidak kontinu menangani sampah di TPS-TPS. “Penanganannya hanya bersifat sementara,” tegasnya.

Sejak akhir tahun lalu, Natala sudah mengingatkan penanganan sampah lewat postingan gambar di media sosial miliknya.

“Kemudian dibersihkan, tapi kejadian itu (penumpukan sampah) terus berulang. Hingga terakhir saya juga membuat video,” katanya.

Sebagai anggota dewan, Natala berkali-kali menyampaikan solusi penanganan sampah ke pihak terkait, baik melalui media sosial maupun dalam rapat-rapat.

“Saya di badan anggaran DPRD pun sudah memberikan kritikan, termasuk saya bertanya langsung via WhatsApp kepada dinas, masalahnya apa,” ujarnya.

Namun, kritik Natala sepertinya menabrak tembok. Sampah masih menggunung. Entah sampai kapan

Alasan kekurangan anggaran di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) menurut Natala, tidak menjadi persoalan. Sebab, dinas lain pun mengalami hal yang sama.

“Yang perlu dipastikan adalah arah kebijakannya seperti apa? Seharusnya (arah kebijakan) bisa membantu program pemerintah di sektor kesehatan,” sambung Natala.

Sederhananya, gunungan sampah di TPS-TPS tidak akan bertumpuk andaikan rutin diangkut setiap hari.

“Keluhan masyarakat sekitar TPS adalah pengambilan yang lambat. Bahkan (ada) yang

Karawang,AMPER@-03B

Anggota DPRD Karawang, Natala Sumedha menyatakan, persoalan penanganan sampah tidak akan pernah selesai apabila dinas tidak bekerja dengan skala prioritas. Pemkab Karawang pun, mestinya memastikan arah kebijakan penanganan sampah.

“Sudah kami sampaikan juga kepada DPRD bahwa Karawang darurat sampah,” kata Natala, di Karawang, Senin (9/3/2020).

“Kami di DPRD paham, dinas mengejar PHD dengan bekerja sama lewat pihak ketiga, sehingga kendaraan sampah yang jumlahnya terbatas lebih banyak fokus